KR-Surya Adi Lesmana

***SALAT JUMAT PERTAMA RAMADAN:** Umat Muslim menjalankan Salat Jumat pertama pada Bulan Ramadan 1446 H di Masjid Pathok Negara Plosokuning, Ngaglik, Sleman, Jumat (7/3/2025). Selama Bulan Ramadan di masjid yang merupakan Cagar Budaya ini, berlangsung berbagai kegiatan keagamaan yang selalu ramai diikuti para jemaah.*

PENANGANAN PERKARA HASTO

KPK Tepis Tudingan 'Ngebut'

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan sengaja mempercepat penanganan perkara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK). "Ya, mungkin perlu ditanya yang memberikan pernyataan terlalu cepat ya, indikator terlalu cepatnya itu apa? Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (7/3).

Tessa juga menegaskan bahwa praperadilan adalah proses hukum yang berjalan paralel dengan proses penyidikan. Sehingga pelimpahan Hasto kepada jaksa untuk segera disidangkan tidak menyalahi prosedur yang berlaku. "Kalau dibilang KPK dalam hal ini penyidik terburu-buru, seandainya mau diburu-buru, kami bisa melakukan itu pada saat praperadilan yang pertama, tapi tidak. Praperadilan yang pertama itu tetap berjalan sesuai dengan hak tersangka mengajukan, penyidik juga melakukan proses penyidikan sesuai dengan kewenangan penyidik," ujarnya.

Seperti diketahui, Penyidik KPK, Kamis (6/3), telah melimpahkan barang bukti dan tersangka Hasto Kristiyanto ke jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk segera disidangkan. "Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum untuk perkara tersangka HK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pelimpahan tersebut diketahui untuk dua perkara sekaligus, yakni dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). **(Ful)-f**

BIAYA PEMILIHAN SUARA ULANG

Mendagri: Daerah Sanggup dengan APBD

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, banyak pemerintah daerah (pemda) yang ternyata sanggup untuk membiayai Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah ditinjau ulang.

Tito menjelaskan, pihaknya telah membahas dengan 24 kepala daerah yang akan menyelenggarakan PSU untuk menggunakan APBD masing-masing, termasuk Provinsi Papua yang akhirnya sanggup menggunakan APBD murni untuk PSU. "Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat, Papua sanggup untuk melalui APBD," kata Tito saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3).

Tito menilai, sebelumnya banyak daerah yang mengajukan penggunaan APBN untuk PSU. Namun, setelah ditinjau kembali oleh pemerintah pusat, banyak daerah yang tidak efisien dalam penyusunan anggaran PSU, seperti perjalanan dinas hingga kegiatan yang tidak perlu. "*Kan* sama kita, kita korek daerah. Banyak daerah yang *nggak* efisien, SPJ-nya, saya minta *kurangin*, untuk hal-hal yang tak perlu, apalagi makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU," ujar Mendagri.

Tito menyebutkan, dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, 10 daerah di antaranya sudah sanggup untuk menggunakan APBD, sedangkan 14 daerah menyatakan tidak mampu. Kini dari 14 daerah tersebut, enam daerah di antaranya masih menghitung kembali kemampuan APBD mereka agar diupayakan tidak menggunakan APBN. Jika kabupaten tidak mampu, APBD dari pemerintah provinsi setempat akan menjadi pendukung untuk biaya PSU. **(Ant)-f**

Dijamin

Sambungan hal 1

Aba Subagja mengatakan, jika para peserta CPNS dan PPPK telah menyelesaikan seluruh proses seleksi dengan baik dan dinyatakan lulus, maka tak perlu khawatir dengan adanya penyesuaian jadwal pengangkatan. "Karena kan teman-teman itu kan sudah diseleksi, apalagi yang CPNS. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKD, SKB gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus ya, mereka tetap aman posisinya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu, itu sudah pastilah," tegasnya.

Aba menekankan, bagi para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 juga telah terdata di sistem Pemerintah. Apalagi proses usul penetapan NIP CPNS telah jatuh pada 22 Februari-23 Maret 2025, dan untuk usul penetapan NI PPPK jatuh pada 1-28 Februari 2025.

"Jadi mereka terdata dalam database, mereka mendaftar, pasti kepastiannya itu pasti ada. Nah justru itu untuk menjamin kepastian mereka saja. Cuma ya tadi harus bersabar sambil menunggu teman-teman yang lain," tutur Aba.

Sedangkan Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan alasan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 menjadi ASN dan PPPK. CASN akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK akan diangkat pada 1 Maret 2026. Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 merupakan keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI. **(Ati)-f**

Kraton

Sambungan hal 1

Menurut Sultan, dalam tatanan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Aparatur Nagari adalah representasi dari harmoni antara kepemimpinan dan rakyat. "Mereka adalah perwujudan makna Manunggaling Kawula lan Gusti sekaligus jembatan yang menghubungkan antara kepemimpinan dengan pengabdian," ujarnya.

Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Nitya Budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Ketua Pameran Hamong Nagari GKR Bendara mengatakan, tatkala membangun Yogyakarta sebagai Praja Baru, Sri Sultan HB I melalui Patih Danurejo telah menata daerah-daerah yang menjadi kekuasaan dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan tidak sekadar membagi wilayah Yogyakarta dalam kategori Kutanegara, Negara Agung, Mancanegara dan Pesisir, namun juga membentuk Pemerintah dari masing-masing kawasan. "Sejarah tersebut diwujudkan dalam Pameran Hamong Nagari. Pameran ini akan mampu membawa siapa pun yang menyaksikan, hanyut dalam informasi yang kompleks tentang tatanan Pemerintah di Yogyakarta. Warisannya dari kelembagaan tersebut kemudian dapat disaksikan dalam toponimi kampung kota saat ini," katanya. **(Dev)-f**

UI Putuskan

Sambungan hal 1

ketentuan dan sisi substansi yang akan ditentukan Pak Rektor dan Pak Bahlil," kata Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Arie Afriansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/3).

Arie menegaskan, UI saat ini masih belum memutuskan apakah perbaikan disertasi tersebut perlu dilakukan secara keseluruhan atau sebagian. "Jadi perbaikan itu nanti sebagaimana karya kualitas ilmu yang pada umumnya, nanti akan ditentukan oleh para promotor dan co-promotornya dan itu nanti tergantung bagaimana substansinya, karena karya ilmiah itu tidak bisa menjadi konsumsi publik dan bagaimana ukuran dan substansi kualitasnya itu nanti akan ditentukan sesuai dengan diskusi dengan para pemimpinnya," ujarnya.

Ia juga mengemukakan, Surat Keputusan (SK) individual juga telah diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat kasus disertasi Bahlil, yakni promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi dan mahasiswa yang terkait. "SK tersebut bersifat individual dan akan disampaikan ke masing-masing pihak yang terkait, dan seperti yang disampaikan Rektor, akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya (sanksi)," ucapnya.

Sebagai bagian dari pembinaan, apabila mahasiswa yang bersangkutan datanya masih ada yang perlu disempurnakan atau diperbaiki, UI akan meminta perbaikan hingga disertasi dinyatakan layak.

Sementara itu, Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan, memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan kasus disertasi Bahlil Lahadalia. **(Ant/Ati)-f**

Pertamina

Sambungan hal 1

Ia berharap kasus dugaan megakorupsi atau praktik koruptif dalam bentuk apapun tidak terjadi lagi di badan usaha milik negara (BUMN), apalagi BUMN kelas dunia seperti Pertamina. "Pertamina adalah *world class company* yang menjadi kebanggaan nasional. Sudah sepantasnya Pertamina menjadi contoh bagi BUMN lainnya dengan menerapkan tata kelola perseroan yang terbaik dan tidak tercela," ucap Eddy Soeparno

Eddy menyatakan optimistis, kasus korupsi di Pertamina itu dapat menjadi pelajaran seluruh BUMN untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. **(Ant/Obi)-f**

Gugatan

Sambungan hal 1

Sebagaimana penjelasan Kejaksaan Agung yang dilansir di beberapa media, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian ìdiblendingî atau dioplos di depo/storage menjadi Pertamax. Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92.

Penanganan korupsi dalam kasus ini sesuai penjelasan dari Kajaksaan Agung yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga mencapai kurang lebih 193,7 triliun sudah berjalan dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun disamping itu ada potensi kerugian masyarakat yang harusnya berhak memperoleh ganti rugi.

Hak yang dapat dituntut masyarakat selaku konsumen pengguna BBM Pertamax adalah ganti rugi, dan hak memperoleh jaminan bahwa penggunaan BBM di kemudian benar-benar sesuai kualitas yang diharuskan. Jaminan ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan agar BBM yang dibeli dan digunakan masyarakat sesuai kualitas yang sesuai.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur antara lain pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Gugatan dimaksud dapat diajukan secara langsung oleh seorang konsumen atau secara kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (Class Action) atau oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dapat juga diajukan oleh pemerintah apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Pemerintah dalam hal ini dapat diwakili oleh Jaksa selaku pengacara negara untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Gugatan perdata ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Berkaitan acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dengan kejadian ini disamping dilakukan proses hukum pidana maupun perdata, juga perlu adanya evaluasi monopoli terhadap pegelolaan usaha di bidang perminyakan yang selama ini dijalankan oleh Pertamina, untuk dapat membuka peluang bagi beberapa pelaku usaha termasuk swasta, agar terjadi persaingan yang sehat dan masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk memilih dan memperoleh BBM yang benar-benar berkualitas.

Dengan tindakan tegas dan berbagai upaya hukum yang dilakukan, dapat menjadi pembelajaran agar kejadian serupa yang menimbulkan kerugian besar baik bagi keuangan negara dan masyarakat luas tidak terulang kembali di waktu yang akan datang.

(Penulis adalah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta)-f

Penting

Sambungan hal 1

"Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan," ujar Haedar.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya perputaran dana dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi politik, Haedar menyoroti, penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR serta diplomasi dengan Arab Saudi, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional.

Selain itu, Haedar menegaskan, di balik semua itu, cita-cita teologis terbesar umat Islam di mana pun adalah berhaji. Oleh karena itu, penyelenggaraan haji harus dikelola dengan sistem yang baik dan tidak bisa dilakukan secara instan.

Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan haji, dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme. "BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta Visi Tri Sukses (Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji dan Sukses Peradaban)," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas dukungan Muhammadiyah terhadap revisi UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, agar BP Haji RI dapat optimal menjalankan tugasnya secara penuh sesuai mandat Presiden. Selain itu, dibahas wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi, demi optimalisasi manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat di Tanah Air.

Haedar kembali menegaskan, Muhammadiyah siap mendukung dan mendoakan BP Haji RI agar menjadi tonggak baru dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia, dengan pelayanan yang lebih profesional, transparan dan memberikan manfaat luas bagi umat. **(Ati)-f**

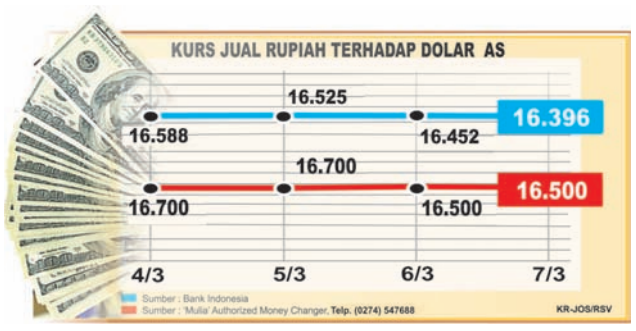

Prakiraan Cuaca Sabtu, 8 Maret 2025

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Transformasi Digital untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Sudarmawan, MT
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Amikom Yogyakarta

KEHADIRAN dunia maya (internet dan teknologi digital) memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, hingga budaya. Pengaruh ini bisa berdampak positip maupun negatif, dampak positif antara lain: kemudahan akses informasi dan komunikasi; adanya peluang baru peningkatan ekonomi; perubahan gaya hidup dan hiburan; mendorong terjadinya revolusi pendidikan; kemudahan dalam layanan publik dan kesehatan. Selain dampak positif juga ada dampak negatif antara lain: ketergantungan dan kecanduan teknologi; privasi dan keamanan data terancam; peningkatan hoaks dan disinformasi; berkurangnya interaksi sosial tatap muka; dampak negatif kesehatan.

Dunia maya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga memiliki tantangan yang perlu diwaspadai. Penggunaan internet yang bijak dan seimbang adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa terkena dampak negatifnya.

Suka atau tidak kita akan terbawa arus transformasi digital menuju dunia maya, apa itu transformasi digital? transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis atau kehidupan, yang mengubah cara operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan atau masyarakat.

Transformasi ini bukan sekadar mengadopsi teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya, strategi, dan model bisnis agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi. Elemen utama transformasi digital antara lain: teknologi digital untuk menghasilkan obyek digital; proses bisnis yang bisa dilakukan antar obyek digital; budaya dan mindset yang mendorong inovasi berbasis data sehingga terciptanya nilai dari obyek digital; pengalaman pelanggan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kepuasan dan interaksi pelanggan.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) harus ikut arus transformasi digital jika tidak ingin tertinggal, UMKM dapat mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperluas pasar. Langkah-langkah transformasi digital yang bisa dilakukan oleh UMKM antara lain, pertama melakukan evaluasi kebutuhan dan kapasitas digital misal apakah bisnis sudah memiliki perangkat, koneksi internet, dan ketrampilan digital yang memadai; kedua membangun kehadiran digital dengan membuat website atau platform toko online atau aktif di media sosial untuk menjual produk secara online; ketiga menggunakan sistem pembayaran digital misal e-wallet (Gopay, OVO, DANA); keempat meningkatkan operasional dengan teknologi misal menggunakan aplikasi seperti Jubelio atau Stockbit untuk membantu dalam pengelolaan inventaris; kelima optimasi pemasaran digital dengan menggunakan iklan digital seperti Facebook Ads, Google Ads, atau TikTok Ads untuk meningkatkan jangkauan pemasaran; keenam meningkatkan keamanan digital dengan menggunakan password yang kuat dan autentikasi dua faktor untuk menghindari penipuan online; ketuju melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan misal dengan memantau data penjualan, engagement pelanggan, dan ROI pemasaran digital serta terus belajar dan beradaptasi dengan mengikuti tren digital, pelatihan online, dan komunitas bisnis digital untuk tetap kompetitif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, UMKM bisa lebih kompetitif, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar secara digital.

Agar UMKM bisa sukses dalam transformasi digital, perubahan mindset (pola pikir) sangat penting. Tidak cukup hanya mengadopsi teknologi, pelaku UMKM juga harus memiliki pola pikir yang adaptif, inovatif, dan berbasis data. Berikut adalah beberapa perubahan mindset yang perlu diterapkan; merubah dari pemikiran "bahwa bisnis saya sudah cukup dengan cara tradisional" menjadi "teknologi bisa membantu saya menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan efisiensi"; dari pemikiran "yang penting produk saya laku" menjadi "bagaimana saya bisa membuat pelanggan kembali membeli dan merekomendasikan produk saya dengan memanfaatkan teknologi?"; dari pemikiran "saya tidak paham teknologi, takut gagal" menjadi "saya bisa belajar dan mencoba teknologi baru untuk mengembangkan bisnis." Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan mindset. Transformasi digital ini merupakan proses terus menerus dan berkelanjutan. UMKM yang mau belajar, beradaptasi, dan terbuka terhadap perubahan akan lebih siap bersaing di era digital.